ABSTRAKSI PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2013

JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SUKOHARJO Tahun 2013 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 1 TAHUN 2013		
Abstrak	:	a. Peraturan Bupati ini dibuat dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya warga masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo maka perlu memperjelas dan mempermudah prosedur pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo; dan agar pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat miskin dan/atau tidak mampu dapat berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, perlu mengatur Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo.
		b. Dasar Hukum pembuatan perbup : UU 13 Tahun 1950, UU 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004, UU 15 Tahun 2004, UU 25 Tahun 2004, UU 29 Tahun 2004, UU 32 Tahun 2004, UU 33 Tahun 2004, UU 40 Tahun 2004, UU 36 Tahun 2009, UU 12 Tahun 2011, PP 58 Tahun 2005, PP 38 Tahun 2007, Perpres 1 Tahun 2007, Perda Kab Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008, Perda Kab Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010.
		c. Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : 1. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan 2. Mekanisme Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dan/Atau Tidak Mampu 3. Jenis Pelayanan Kesehatan 4. Hak Dan Kewajiban Pasien Serta Pemberi Pelayanan Kesehatan 5. Pembiayaan
Catatan	:	1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu di

		Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (2 Januari 2013)

ABSTRAKSI PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2013

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL TAHUN 2013 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 15 TAHUN 2013		
Abstrak	:	d. Peraturan Bupati ini dibuat dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu dilakukan pengaturan tata cara pemungutan retribusi terminal.
		e. Dasar Hukum pembuatan perbup : UU 13 Tahun 1950, UU 32 Tahun 2004, UU 33 Tahun 2004, UU 38 Tahun 2004, UU 22 Tahun 2009, UU 28 Tahun 2009, UU 12 Tahun 2011, PP 41 Tahun 1993, PP 42 Tahun 1993, PP 43 Tahun 1993, PP 34 Tahun 2006, PP 38 Tahun 2007, PP 37 Tahun 2011, Perpres 1 Tahun 2007, Perda Kab Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008, Perda Kab Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008, Perda Kab Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010, Perda Kab Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011.
		f. Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : 6. Objek Retribusi 7. Tata Cara Pemungutan Retribusi 8. Penerbitan SKRD 9. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi 10. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
Catatan	:	3. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2000 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Formulir Pendaftaran dan SPTRD, Bentuk, Isi dan Ukuran Benda Berharga serta Tata Penerbitan SKRD dan SKRDKBT Pada Terminal di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 61) dan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2000 tentang Tata

		Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Penggunaan Tempat Kegiatan Usaha (Kios) Terminal di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (7 Mei 2013)

ABSTRAKSI PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2013

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2013 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 44 TAHUN 2013		
Abstrak	:	g. Peraturan Bupati ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pasal 197 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
		h. Dasar Hukum pembuatan perbup : UU 13 Tahun 1950, UU 28 Tahun 1999, UU 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004, U 32 Tahun 2004, UU 33 Tahun 2004, UU 28 Tahun 2009, UU 12 Tahun 2011, PP 109 Tahun 2000, PP 24 Tahun 2004, PP 54 Tahun 2005, PP 55 Tahun 2005, PP 56 Tahun 2005, PP 58 Tahun 2005, PP 79 Tahun 2005, PP 8 Tahun 2006, PP 38 Tahun 2007, PP 71 Tahun 2010, Perpres 54 Tahun 2010, Permendagri 13 Tahun 2006, Perda Kab Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008, Perda Kab Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010.
		i. Perda ini mengatur Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
Catatan	:	5. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 438), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 6. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (19 Desember 2013)